

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



20
25





**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

DISUSUN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen (Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen) Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta merupakan penyesuaian terhadap Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021– 2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Sragen.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga disusun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan sistematika penyusunan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Sehingga penyusunan rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Demikian Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dengan harapan sebagai rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam penetapan KUA dan PPAS dan RKA Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan dapat

memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai alat kontrol dan tolok ukur dalam pengendalian dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen selama tahun 2025.

Sragen, 3 Juli 2025

KERALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN



DWIYANTO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda /IVC

NIP. 19770310 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1		9
Tabel 3.1		24
Tabel 3.2		28
Tabel 3.3		29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 5);
 - 11) Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 58);
 - 12) Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
 - 13) Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
 - 14) Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen;

- 2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja;
- 3) Perubahan kebijakan anggaran, seperti refocusing, penghematan, atau penambahan alokasi anggaran dari pusat atau provinsi.

1.3.2 Tujuan

Sementara tujuan penyusunan perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKAP - DPPA Tahun 2025;
- 2) Sebagai acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan;
- 3) Mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, sehingga memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja

- 1) Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- 2) Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Adanya kebutuhan untuk merubah indikator kinerja program, kegiatan, dan kegiatan yang meliputi perubahan keluaran, target keluaran, lokasi, dan pagu indikatif.

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan.

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan perkiraan capaian tahun berkenaan.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Berisi tentang rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan Pagu. Perubahan Renja Perangkat Daerah beserta indikator keberhasilan program, serta penjelasan kegiatan dan sub kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Badan pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpengaruh signifikan terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengacu pada pencapaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025. Pada tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen melaksanakan Urusan Keuangan dengan pagu indikatif sejumlah Rp 421.918.135.857,00 (Empat ratus dua puluh satu milyar sembilan ribu delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Dana ini terdiri dari 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 92 (sembilan puluh dua) sub kegiatan.

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 tersebut, ada 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 58.072.617.619,00 (Lima puluh delapan milyar tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dengan tingkat capaian realisasi anggaran 13,76%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				421.918.135.857		58.072.617.619		13,76
5.02	Meningkatnya pendapatan asli daerah dan Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	KEUANGAN				421.918.135.857		58.072.617.619		13,76
5.02.01	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,45	22.072.618.457	25,00	3.059.175.582	25,00	13,86
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai	79,45		25,00		25,00	
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu [Dokumen]	Dokumen	22,00	33.999.800	5,00	1.062.500	22,73	3,13
5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Dokumen]	Dokumen	2,00	5.999.800	1,00	1.062.500	50,00	17,71
5.02.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	4.000.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	4.000.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	3.500.000	1,00	0	100,00	0,00
5.02.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD [Dokumen]	Dokumen	1,00	3.500.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	Laporan	12,00	6.500.000	3,00	0	25,00	0,00
5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [Laporan]	Laporan	4,00	6.500.000	0,00	0	0,03	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [Dokumen/ Laporan]	Dokumen/ Laporan	22,00	20.470.422.934	6,00	2.796.745.937	27,27	13,66
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	Orang/bulan	70,00	20.444.638.934	70,00	2.796.745.937	100,00	13,68
5.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN [Dokumen]	Dokumen	12,00	4.250.000	3,00	0	25,00	0,00
5.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD [Dokumen]	Dokumen	12,00	10.950.000	3,00	0	25,00	0,00
5.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD [Laporan]	Laporan	5,00	5.488.000	0,00	0	0,02	0,00
5.02.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan [Dokumen]	Dokumen	2,00	5.096.000	0,00	0	0,05	0,00
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah [Dokumen/Laporan]	Dokumen/Laporan	9,00	1.997.500	0,00	0	0,01	0,00
5.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD [Laporan]	Laporan	2,00	1.997.500	0,00	0	0,05	0,00
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan [Dokumen]	Dokumen	220,00	25.000.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan [Orang]	Orang	3,00	25.000.000	0,00	0	0,03	0,00
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah [Dokumen/Laporan]	Dokumen/Laporan	7,00	626.070.400	5,00	53.431.000	71,43	8,53
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	1,00	14.998.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	1,00	183.732.400	1,00	15.926.000	100,00	8,67
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	Paket	1,00	109.990.000	1,00	19.052.500	100,00	17,32
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	Paket	1,00	25.000.000	0,00	0	0,10	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	Dokumen	1,00	2.400.000	0,00		0,10	0,00
5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu [Laporan]	Laporan	12,00	74.970.000	3,00	4.547.500	25,00	6,07
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	Laporan	8,00	200.000.000	1,00	5.925.000	12,50	2,96
5.02.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	Dokumen	800,00	14.980.000	200,00	7.980.000	25,00	53,27
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun [Unit]	Unit	8,00	85.894.188	1,00		12,50	0,00
5.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [Unit]	Unit	5,00	49.902.000	1,00		20,00	0,00
5.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	2,00	20.782.188	0,00		0,05	0,00
5.02.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	Unit	2,00	15.210.000	0,00		0,05	0,00
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [Laporan]	Laporan	3.450,00	192.039.000	10,00	73.477.600	0,29	38,26
5.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	Laporan	3.400,00	3.480.000	0,00		0,00	0,00
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	Laporan	36,00	19.600.000	9,00	1.244.100	25,00	6,35
5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	Laporan	2,00	168.959.000	1,00	72.233.500	50,00	42,75
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang disusun sesuai ketentuan [Unit]	Unit	31,00	637.194.635	4,00	134.458.545	12,90	21,10
5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	Unit	11,00	397.200.000	2,00	48.653.353	18,18	12,25
5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	Unit	3,00	165.000.000	1,00	31.656.092	33,33	19,19
5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [Unit]	Unit	1,00	74.994.635	1,00	54.149.100	100,00	72,20

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Prosentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Prosentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	1. 41% 2. 26%	392.459.234.900	25,00	54.771.236.322	26,32	13,96
	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah		Prosentase Perangkat Daerah yang merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan	%	90					
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah		Prosentase laporan Perangkat Daerah tepat waktu serta sesuai dengan standar SAP	%	100					
5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun sesuai aturan [Dokumen]	Dokumen	302,00	1.158.745.000	0,00	213.529.500	0,00	18,43
5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun [Dokumen]	Dokumen	2,00	60.000.000	0,00	0	0,05	0,00
5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun [Dokumen]	Dokumen	2,00	55.000.000	0,00	0	0,05	0,00
5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi [Dokumen]	Dokumen	46,00	14.285.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi [Dokumen]	Dokumen	46,00	15.505.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi [Dokumen]	Dokumen	46,00	8.000.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi [Dokumen]	Dokumen	46,00	8.000.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [Dokumen]	Dokumen	3,00	735.000.000	0,00	208.188.500	0,03	28,32
5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD [Dokumen]	Dokumen	5,00	190.000.000	0,00	0	0,02	0,00
5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran [Dokumen]	Dokumen	2,00	23.000.000	0,00	0	0,05	0,00
5.02.02.2.01.0010		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan [Dokumen]	Dokumen	11,00	10.000.000	0,00	0	0,01	0,00
5.02.02.2.01.0011		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah [Dokumen]	Dokumen	46,00	10.000.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.01.0012		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan [Dokumen]	Dokumen	1,00	4.997.000	0,00	0	0,10	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.01.0013		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota [Orang]	Orang	46,00	24.958.000	0,00	5.341.000	0,00	21,40
5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dikerjakan [Doku men/Laporan]	Doku men/Laporan	14.675,00	635.000.000	3.465,00	33.812.000	23,61	5,32
5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah [Dokumen]	Dokumen	48,00	50.000.000	12,00	10.686.500	25,00	21,37
5.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya [Laporan]	Laporan	1,00	5.000.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.02.2.02.0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD [Dokumen]	Dokumen	12,00	80.000.000	3,00	8.025.000	25,00	10,03
5.02.02.2.02.0004		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah [Dokumen]	Dokumen	1,00	5.000.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya [Dokumen]	Dokumen	84,00	80.000.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.02.0006		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank [Dokumen]	Dokumen	12,00	30.000.000	0,00	0	0,01	0,00
5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) [Laporan]	Laporan	14.353,00	160.000.000	3.450,00	15.100.500	24,04	9,44

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.02.0008		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas [Dokumen]	Dokumen	12,00	15.000.000	0,00	0	0,01	0,00
5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait [Dokumen]	Dokumen	4,00	70.000.000	0,00	0	0,03	0,00
5.02.02.2.02.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan [Dokumen]	Dokumen	1,00	100.000.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.02.2.02.0011		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota [Orang]	Orang	147,00	40.000.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah [Dokumen/Laporan]	Dokumen/Laporan	280,00	622.713.900	13,00	43.331.980	4,64	6,96
5.02.02.2.03.0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah [Laporan]	Laporan	4,00	21.779.000	0,00	0	0,03	0,00
5.02.02.2.03.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban [Dokumen]	Dokumen	50,00	64.799.500	12,00	18.487.500	24,00	28,53
5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran [Laporan]	Laporan	50,00	22.000.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi [Laporan]	Laporan	7,00	69.976.000	1,00	18.068.680	14,29	25,82
5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota [Dokumen]	Dokumen	4,00	195.000.000	0,00	0	0,03	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah [Dokumen]	Dokumen	2,00	9.999.900	0,00	1.675.800	0,05	16,76
5.02.02.2.03.0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah [Dokumen]	Dokumen	1,00	59.953.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.02.2.03.0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah [Dokumen]	Dokumen	1,00	34.998.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.02.2.03.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota [Orang]	Orang	130,00	49.231.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.03.0012		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina [Lembaga]	Lembaga	30,00	54.979.500	0,00	5.100.000	0,00	9,28
5.02.02.2.03.0013		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota [Laporan]	Laporan	1,00	39.998.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun [Laporan]	Laporan	15,00	389.943.993.000	6,00	54.480.562.842	40,00	13,97
5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan [Laporan]	Laporan	12,00	375.443.993.000	3,00	54.412.162.842	25,00	14,49
5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak [Laporan]	Laporan	12,00	10.000.000.000	3,00	0	25,00	0,00
5.02.02.2.04.0010		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota [Laporan]	Laporan	1,00	4.500.000.000	0,00	68.400.000	0,10	1,52
5.02.02.2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen/Jumlah Orang dalam pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah [Dokumen/Orang]	Dokumen/Orang	76,00	98.783.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.02.2.05.0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah [Dokumen]	Dokumen	1,00	48.863.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.02.2.05.0003		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota [Orang]	Orang	75,00	49.920.000	0,00	0	0,00	0,00

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.03	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase pengumpulan laporan BMD dan penatausahaan barang milik daerah	%	100	1.193.500.000	25	28.046.000	25	2,35
5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah [Dokumen/Laporan]	Dokumen/Laporan	221,00	1.193.500.000	0,00	28.046.000	0,00	2,35
5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun [Dokumen]	Dokumen	1,00	96.000.000	0,00	2.975.000	0,10	3,10
5.02.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah [Dokumen]	Dokumen	2,00	40.000.000	0,00	0	0,05	0,00
5.02.03.2.01.0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah [Laporan]	Laporan	4,00	67.500.000	1,00	0	25,00	0,00
5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah [Laporan]	Laporan	4,00	140.000.000	1,00	0	25,00	0,00
5.02.03.2.01.0007		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah [Laporan]	Laporan	2,00	560.000.000	0,00	5.135.000	0,05	0,92
5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah [Dokumen]	Dokumen	2,00	110.000.000	0,00	7.866.000	0,05	7,15
5.02.03.2.01.0011		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah [Laporan]	Laporan	6,00	105.000.000	0,00	12.070.000	0,02	11,50
5.02.03.2.01.0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota [Orang]	Orang	200,00	75.000.000	0,00	0	0,00	0,00
5.02.04	Meningkatnya efektivitas penagihan pajak serta pembinaan dan pengawasan pajak daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100	6.192.782.500	25	214.159.715	25	25
	Meningkatnya efektivitas pendaftaran, pendataan potensi, serta pengembangan dan penyuluhan pajak daerah		Prosentase wajib pajak baru yang terdaftar dibandingkan potensi wajib pajak	%	100		25		25	25
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pembinaan retribusi		Prosentase ketertiban pelaporan penerimaan retribusi dari OPD pemungut retribusi	%	100		25		25	25
5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dicapai [Dokumen/Laporan]	Dokumen/Laporan	187,00	6.192.782.500	37,00	214.159.715	19,79	3,46
5.02.04.2.01.0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah [Dokumen]	Dokumen	1,00	171.270.000	0,00	1.524.500	0,10	0,89
5.02.04.2.01.0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah [Unit]	Unit	3,00	768.200.000	1,00	46.955.300	33,33	6,11

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah [Laporan]	Laporan	1,00	173.857.500	0,00	0	0,10	0,00
5.02.04.2.01.0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah [Laporan]	Laporan	1,00	79.999.000	0,00	11.766.000	0,10	14,71
5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya [Obyek Pajak]	Obyek Pajak	130,00	24.938.000	30,00	6.600.000	23,08	26,47
5.02.04.2.01.0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah [Dokumen]	Dokumen	1,00	1.658.563.000	0,00	67.034.915	0,10	4,04
5.02.04.2.01.0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah [Layanan]	Layanan	20,00	184.750.000	5,00	0	25,00	0,00
5.02.04.2.01.0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi [Dokumen]	Dokumen	1,00	1.550.000.000	0,00	0	0,10	0,00
5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah [Dokumen]	Dokumen	4,00	690.000.000	1,00	12.508.000	25,00	1,81
5.02.04.2.01.0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah [Dokumen]	Dokumen	12,00	6.997.000	0,00	0	0,01	0,00
5.02.04.2.01.0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah [Dokumen]	Dokumen	11,00	385.000.000	0,00	63.521.000	0,01	16,50
5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah [Laporan]	Laporan	2,00	499.208.000	0,00	4.250.000	0,05	0,85

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dikenal adanya program, kegiatan dan sub kegiatan, terakhir diadakan perubahan atas Permendagri ini dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 , tanggal 24 Maret 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 900.1.15.5-5889 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, sementara sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen melaksanakan 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 92 (sembilan puluh dua) sub kegiatan dengan kebutuhan dana pagu indikatif sejumlah Rp 421.918.135.857,00 (Empat ratus dua puluh satu milyar sembilan ribu delapan belas juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- 11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 12) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 13) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- 3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 4) Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- 5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

- 9) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
 - 10) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - 11) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 6) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - 7) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 8) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 9) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 10) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 11) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
 - 12) Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- 1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- 2) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Penyusunan Standar Harga
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 4) Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 5) Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 8) Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 3) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 4) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 6) Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 7) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - 8) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - 9) Penagihan Pajak Daerah
 - 10) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - 11) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - 12) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Total kebutuhan dana pagu indikatif program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sejumlah Rp 431.632.363.191,00 (Empat ratus tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus

sembilan puluh satu rupiah) sumber pendanaannya berasal dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025.

Didalam perubahan 2025 terdapat 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan dan Sub kegiatan diperubahan ada 92 (Sembilan puluh dua) yang dirumuskan dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025. Kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 ditujukan kepada internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, instansi pemerintah, dan instansi swasta, yang terkait Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, serta seluruh penduduk Kabupaten Sragen sebagai wujud pelayanan publik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Urusan Keuangan.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Penetapan APBD 2025			Bertambah/Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
			Target	Satuan	Anggaran Penetapan 2025			Target	Satuan	Anggaran Setelah Perubahan 2025	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				421.918.135.857		(9.814.227.334)			431.732.363.191	
5.02	KEUANGAN				421.918.135.857		(9.814.227.334)			431.732.363.191	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerahhjang Kinerja Perangkat daerah dalam satu Tahun	95	Persen	22.072.618.457		(958.746.780)	95	Persen	23.031.365.237	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	22	Dokumen	33.999.800		6.956.200	22	Dokumen	27.043.600	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	5.999.800		(20.000)	2	Dokumen	6.019.800	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.000.000		1.105.000	1	Dokumen	2.895.000	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.000.000		764.200	1	Dokumen	3.235.800	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.500.000		588.000	1	Dokumen	2.912.000	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.500.000		353.000	1	Dokumen	3.147.000	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	6.500.000		2.210.000	12	Laporan	4.290.000	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	6.500.000		1.956.000	4	Laporan	4.544.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat	22	Dokumen/Laporan	20.470.422.934		(1.173.128.720)	22	Dokumen/Laporan	21.643.551.654	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/bulan	20.444.638.934		(1.181.097.220)	70	Orang/bulan	21.625.736.154	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12	Dokumen	4.250.000		1.275.000	12	Dokumen	2.975.000	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12	Dokumen	10.950.000		3.313.500	12	Dokumen	7.636.500	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	5.488.000		1.507.000	5	Laporan	3.981.000	
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	5.096.000		1.873.000	2	Dokumen	3.223.000	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9	Dokumen/Laporan	1.997.500		637.500	9	Dokumen/Laporan	1.360.000	
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	1.997.500		637.500	2	Laporan	1.360.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikerjakan	220	Dokumen	25.000.000		10.650.000	220	Dokumen	14.350.000	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang	25.000.000		10.650.000	3	Orang	14.350.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Dokumen /Laporan	626.070.400		100.365.700	7	Dokumen /Laporan	525.704.700	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1	Paket	14.998.000		4.608.000	1	Paket	10.390.000	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	183.732.400		(35.253.600)	1	Paket	218.986.000	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	109.990.000		4.037.500	1	Paket	105.952.500	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	25.000.000		7.503.000	1	Paket	17.497.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Penetapan APBD 2025			Bertambah/Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
			Target	Satuan	Anggaran Penetapan 2025			Target	Satuan	Anggaran Setelah Perubahan 2025	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	2.400.000		2.040.000	1	Dokumen	360.000	
5.02.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	74.970.000		13.775.000	12	Laporan	61.195.000	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8	Laporan	200.000.000		99.140.800	8	Laporan	100.859.200	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800	Dokumen	14.980.000		4.515.000	800	Dokumen	10.465.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun	8	Unit	85.894.188		1.249.000	8	Unit	84.645.188	
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		0			0	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	49.902.000		(13.961.000)	5	Unit	63.863.000	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	20.782.188		0	2	Unit	20.782.188	
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	15.210.000		15.210.000	2	Unit	0	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3450	Laporan	192.039.000		(6.536.460)	3450	Laporan	198.575.460	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3400	Laporan	3.480.000		1.107.000	3400	Laporan	2.373.000	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	19.600.000		(20.000.000)	36	Laporan	39.600.000	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	2	Laporan	168.959.000		12.356.540	2	Laporan	156.602.460	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang disusun sesuai ketentuan	31	Unit	637.194.635		101.060.000	31	Unit	536.134.635	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	397.200.000		101.060.000	11	Unit	296.140.000	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	165.000.000		0	3	Unit	165.000.000	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	Unit	74.994.635		0	1	Unit	74.994.635	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase OPD yang telah menyusun laporan Keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)			392.459.234.900		(9.359.579.679)			401.818.814.579	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun sesuai aturan	263	Dokumen	1.158.745.000		179.807.350	263	Dokumen	978.937.650	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	60.000.000		29.153.500	2	Dokumen	30.846.500	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	55.000.000		26.556.000	2	Dokumen	28.444.000	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	46	Dokumen	14.285.000		9.067.500	46	Dokumen	5.217.500	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	46	Dokumen	15.505.000		9.717.500	46	Dokumen	5.787.500	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	46	Dokumen	8.000.000		2.292.000	46	Dokumen	5.708.000	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	46	Dokumen	8.000.000		(1.916.000)	46	Dokumen	9.916.000	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	Dokumen	735.000.000		22.720.300	3	Dokumen	712.279.700	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	Dokumen	190.000.000		54.495.500	5	Dokumen	135.504.500	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen	23.000.000		9.740.500	2	Dokumen	13.259.500	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran	11	Dokumen	10.000.000		3.926.800	11	Dokumen	6.073.200	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	46	Dokumen	10.000.000		3.707.250	46	Dokumen	6.292.750	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran	1	Dokumen	4.997.000		903.000	1	Dokumen	4.094.000	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	46	Orang	24.958.000		9.443.500	46	Orang	15.514.500	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dikerjakan	14353	Dokumen/Laporan	635.000.000		254.165.550	14353	Dokumen/Laporan	380.834.450	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48	Dokumen	50.000.000		14.952.700	48	Dokumen	35.047.300	
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	Laporan	5.000.000		1.500.000	1	Laporan	3.500.000	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	12	Dokumen	80.000.000		48.714.000	12	Dokumen	31.286.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Penetapan APBD 2025			Bertambah/Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
			Target	Satuan	Anggaran Penetapan 2025			Target	Satuan	Anggaran Setelah Perubahan 2025	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	5.000.000		1.500.000	1	Dokumen	3.500.000	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	84	Dokumen	80.000.000		33.278.000	84	Dokumen	46.722.000	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	Dokumen	30.000.000		9.661.500	12	Dokumen	20.338.500	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	0	Laporan	160.000.000		50.913.750	0	Laporan	109.086.250	
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	Dokumen	15.000.000		6.255.300	12	Dokumen	8.744.700	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	4	Dokumen	70.000.000		17.988.000	4	Dokumen	52.012.000	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	100.000.000		41.400.000	1	Dokumen	58.600.000	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	147	Orang	40.000.000		28.002.300	147	Orang	11.997.700	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	506	Dokumen/Laporan	622.713.900		165.260.600	506	Dokumen/Laporan	457.453.300	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	Laporan	21.779.000		8.097.000	4	Laporan	13.682.000	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan	50	Dokumen	64.799.500		0	50	Dokumen	64.799.500	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50	Laporan	22.000.000		15.780.000	50	Laporan	6.220.000	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	Laporan	69.976.000		12.706.000	7	Laporan	57.270.000	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	Dokumen	195.000.000		34.497.000	4	Dokumen	160.503.000	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	Dokumen	9.999.900		2.456.500	2	Dokumen	7.543.400	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	59.953.000		26.493.250	1	Dokumen	33.459.750	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	34.998.000		(7.695.750)	1	Dokumen	42.693.750	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	130	Orang	49.231.000		21.274.750	130	Orang	27.956.250	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	30	Lembaga	54.979.500		34.096.350	30	Lembaga	20.883.150	
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Laporan	39.998.000		17.555.500	1	Laporan	22.442.500	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	4	Laporan	389.943.993.000		(10.140.676.179)	4	Laporan	399.984.669.179	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Laporan	375.443.993.000		(9.786.510.000)	12	Laporan	385.230.503.000	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	10.000.000.000		(327.166.179)	1	Laporan	10.327.166.179	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	Laporan	4.500.000.000		(27.000.000)	1	Laporan	4.527.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Penetapan APBD 2025			Bertambah/Berkurang		Setelah Perubahan			Keterangan
			Target	Satuan	Anggaran Penetapan 2025			Target	Satuan	Anggaran Setelah Perubahan 2025	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen/Jumlah Orang dalam pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan	154/70	Dokumen/Orang	98.783.000		81.863.000	154/70	Dokumen/Orang	16.920.000	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	48.863.000		31.943.000	1	Dokumen	16.920.000	
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah	75	Orang	49.920.000		49.920.000	75	Orang	0	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase OPD yang mengelola Barang Milik Daerah yang dengan baik			1.193.500.000		124.219.625			1.069.280.375	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	313	Dokumen/Laporan	1.193.500.000		124.219.625	313	Dokumen/Laporan	1.069.280.375	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	96.000.000		28.800.200	1	Dokumen	67.199.800	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	40.000.000		8.987.500	2	Dokumen	31.012.500	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan	67.500.000		20.250.300	4	Laporan	47.249.700	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	Laporan	140.000.000		(24.131.500)	4	Laporan	164.131.500	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	Laporan	560.000.000		7.729.000	2	Laporan	552.271.000	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	2	Dokumen	110.000.000		24.534.625	2	Dokumen	85.465.375	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6	Laporan	105.000.000		31.668.000	6	Laporan	73.332.000	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200	Orang	75.000.000		26.381.500	200	Orang	48.618.500	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kenaikan pendapatan retribusi daerah Persentase kenaikan pendapatan pajak daerah	9,69	3,29 % %	6.192.782.500		479.879.500	9,69	3,29 % %	5.712.903.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dicapai	245	Dokumen/Laporan	6.192.782.500		479.879.500	245	Dokumen/Laporan	5.712.903.000	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	171.270.000		67.660.000	1	Dokumen	103.610.000	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3	Unit	768.200.000		59.037.000	3	Unit	709.163.000	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Laporan	173.857.500		38.500.000	1	Laporan	135.357.500	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Laporan	79.999.000		2.400.000	1	Laporan	77.599.000	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	130	Obyek Pajak	24.938.000		7.583.000	130	Obyek Pajak	17.355.000	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	Dokumen	1.658.563.000		(4.417.500)	1	Dokumen	1.662.980.500	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	20	Layanan	184.750.000		63.650.000	20	Layanan	121.100.000	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	Dokumen	1.550.000.000		(96.700.000)	1	Dokumen	1.646.700.000	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	Dokumen	690.000.000		246.163.000	4	Dokumen	443.837.000	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	6.997.000		2.175.000	12	Dokumen	4.822.000	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11	Dokumen	385.000.000		8.747.000	11	Dokumen	376.253.000	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Laporan	499.208.000		85.082.000	2	Laporan	414.126.000	
J U M L A H					421.918.135.857		(9.714.227.334)			431.632.363.191	

3.2 TUJUAN, SASARAN DAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dalam Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tahun 2025 adalah masa transisi dari dokumen perencanaan strategis tahun 2021-2026 menjadi dokumen perencanaan strategis tahun 2025-2029, maka dokumen perencanaan perubahan tahun 2025 menyajikan tujuan, sasaran berikut indikator pada dua periode sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1	Meningkatkan persentase PAD serta pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya mewujudkan laporan keuangan daerah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian Kabupaten Sragen guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya,dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi Formulasi Pengukuran : Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah pada tahun bersangkutan dengan peringkat sbb: 1.Tingkat I opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2.Tingkat II opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3.Tingkat III opini Tidak Wajar 4.Tingkat IV opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan
1.1	Meningkatnya pendapatan asli daerah	1 Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya,dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi Formulasi Pengukuran : Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan (n) dikurangi jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (n-1) dibagi jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
			lalu (n-1) dikali 100
			Tipe Perhitungan : Komulatif
			Sumber Data : BPKPD Kabupaten Sragen
1.2	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	1. Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yang baik (%)	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya mewujudkan tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yang baik guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan public berbasis teknologi Formulasi Pengukuran : Formulasi Pengukuran : {Laporan keuangan lengkap (40%) + bukti dukung yang dibutuhkan lengkap (30%) + standar umum yang telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja (15%) + Laporan keuangan sesuai prinsip yang berlaku umum (15%)}
			Tipe Perhitungan : Komulatif
			Sumber Data : BPKPD Kabupaten Sragen

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	5
1.	Tujuan: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif Formulasi Pengukuran: Penghitungan indeks komposit yang dihitung berdasarkan 6 indikator kinerja utama mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang dapat diakses melalui Aplikasi IPKD. Tipe Penghitungan: Komulatif Penanggungjawab: BPKPD Kabupaten Sragen Sumber Data: BPKPD Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4	5
1.1	Sasaran 1: Meningkatnya pendapatan asli daerah	Prosentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur utama kemandirian fiskal daerah serta relevan dengan tugas pokok dalam optimalisasi pendapatan daerah guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif Formulasi Pengukuran: Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan (n) dikurangi jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (n-1) dibagi jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun lalu (n-1) dikali 100 Tipe Penghitungan: Komulatif Penanggungjawab: BPKPD Kabupaten Sragen Sumber Data: BPKPD Kabupaten Sragen
1.2	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengevaluasi kinerja PD dalam upaya mewujudkan laporan keuangan daerah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian Kabupaten Sragen guna mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif Formulasi Pengukuran: Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah pada tahun bersangkutan dengan peringkat sbb: 1. Tingkat I opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Tingkat II opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3. Tingkat III opini Tidak Wajar 4. Tingkat IV opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) Tipe Penghitungan: Non Komulatif Penanggungjawab: BPKPD Kabupaten Sragen Sumber Data: Hasil Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sampai dengan triwulan I.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sragen maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Target capaian kinerja dari semua indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Evaluasi rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang meliputi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, sumber pendanaan, dan kebutuhan dana/pagu indikatif dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan terbaru;

3. Fokus utama pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan capaian kinerja, bukan sekedar menitikberatkan pada realisasi/penyerapan anggaran;
4. Pengolahan dan pengelolaan data kinerja yang bersifat pasti, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan yang berkelanjutan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal, lintas instansi pemerintah, instansi swasta, maupun sektor informal yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan kinerja.

4.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, obyektif, dan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen secara periodik dan berkesinambungan guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
3. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan RKA sebelum ditetapkan menjadi DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2025 antara lain:

1. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Dalam rangka sinergitas penatausahaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penatausahaan dan aset daerah, harus dilaksanakan lebih insentif, agar proses yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mewujudkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang konsisten, terkait, dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran untuk dapat membantu perbaikan di masa mendatang.

Sragen, 3 Juli 2025



KEPALA BPKPD
KABUPATEN SRAGEN
DWI YANTO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770310 199511 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Telp. (0271) 890983, Fax. (0271) 890983
Website: bpkpd.sragenkab.go.id, E-mail: bpkpd@sragenkab.go.id
SRAGEN 57211

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 900.1.1.2/622/25/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman kepada:
1. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
 2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
 3. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
- KETIGA : Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun dalam rangka penyesuaian Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdasarkan hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
- KEEMPAT : Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dalam Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan RAPBD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

- KELIMA : Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tujuan antara lain:
1. Mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, serta sebagai penyesuaian terhadap Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
 2. Sebagai rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUPA-PPAS dan Perubahan RKA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 3. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait Urusan Keuangan; dan
 4. Sebagai alat kontrol dan tolok ukur dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang lebih terukur dan lebih optimal.
- KEENAM : Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tata cara penyusunan sebagai berikut:
1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025;
 2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
 3. Penetapan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KETUJUH : Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sekurang-kurangnya menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan dan keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK dan kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan perkiraan capaian tahun berkenaan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah.

Berisi tentang rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah beserta indikator keberhasilan program, serta penjelasan kegiatan dan subkegiatan beserta output dan outcome yang dicapai.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
3. Rencana tindak lanjut.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KESEMBILAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Mei 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN



DWIYANTO, S STP, M Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19770310 199511 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen;
Kepala Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPKPD KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 900.1.1.2/622/25/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAAAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAAAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dwiyanto, SSTP, M Si	Kepala BPKPD	Penanggungjawab
2.	Titi Rahayu, SE, M M	Plt. Sekretaris BPKPD	Ketua
3.	Indah Yudi Perwitosari, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Nuryahman Hartono, ST, M.Si	Kabid Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Pajak	Anggota
5.	Niken Salindri, S.STP., M.M	Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak	Anggota
6.	Kadiman, S.Sos., M.M	Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasda	Anggota
7.	Edie Diah Palupi, SE, M.S.E	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
8.	Suhartomo, S.Kom	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
9.	Ahmad Kurniawan Indrajaya, S.E	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
10.	Sugiman, S.Sos	Analisa Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
11.	Riana Wahyu Hestningsih, S.E., M.M	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Agung Hartanto, SE	Analisis Penagihan Pajak	Anggota
13.	Rahmania Widi Nastiti, A.Md.M	Pengelola Data Potensi Pajak	Anggota
14.	Juli Sunarjanto, SE, MM	Analisis Perbendaharaan	Anggota
15.	Bramantya Juprihastaka, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
16.	Budi Setyorini, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
17.	Febriaji Primadeni, A.Md	Fungsional Pranata Komputer	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

 DWIYANTO, S SSTP, M Si
Pemula Utama Muda/IVc
NIP. 19770310 199511 1 001